

Financial Sustainability: Sebuah Kajian dari Aspek Kemandirian Daerah dan Belanja Modal

Muhammad Fadli Ramadhan ^{1*}, Maria ², Zulkifli ³

^{1*,2,3} Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Sriwijaya, Jl. Srijaya Negara, Palembang.

Email: ramadhanfadli1103@gmail.com ^{1*}, mariamardjuki@polsri.ac.id ², zulkifliwancik@yahoo.com ³

Histori Artikel:

Dikirim 9 Agustus 2025; Diterima dalam bentuk revisi 20 September 2025; Diterima 10 November 2025; Diterbitkan 1 Desember 2025. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET) – Lembaga KITA.

Suggested citation:

Ramadhan, M. F., Maria, M., & Zulkifli, Z. (2025). Financial Sustainability: Sebuah Kajian dari Aspek Kemandirian Daerah dan Belanja Modal. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(6), 5684-5692. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i6.5289>.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh Kemandirian daerah dan Belanja Modal terhadap Financial Sustainability pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan fiskal yang mendukung tercapainya keberlanjutan keuangan daerah. Data yang digunakan bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama periode 2019 hingga 2023. Penelitian ini mencakup seluruh 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan metode sensus sebagai teknik pengambilan sampel. Analisis data dilakukan melalui metode regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak EViews versi 12. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial, Kemandirian daerah maupun Belanja Modal memiliki pengaruh positif terhadap Financial Sustainability. Selain itu, keduanya juga terbukti secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Financial sustainability.

Kata Kunci: Kemandirian Daerah; Belanja Modal; Financial Sustainability.

Abstract

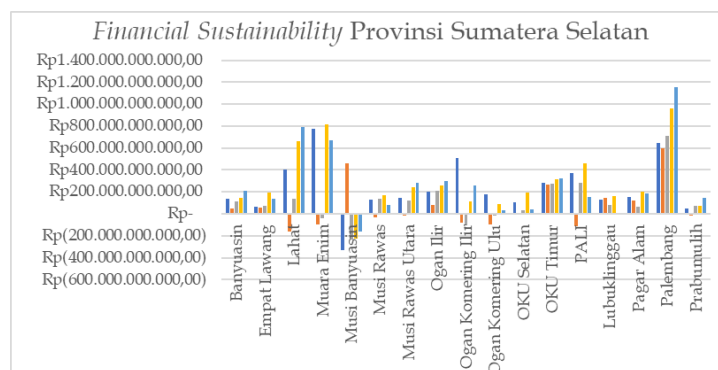
This study was conducted to determine the extent of the influence of Regional Independence and Capital Expenditure on Financial sustainability in district/city governments in South Sumatra Province. It is hoped that the results of this study can be used as a consideration in the formulation of fiscal policies that support the achievement of regional financial sustainability. The data used are sourced from the Regional Government Financial Report (LKPD) for the period 2019 to 2023. This study covers all 17 districts/cities in South Sumatra Province using the census method as a sampling technique. Data analysis was carried out through the panel data regression method with the help of EViews software version 12. The results of the analysis show that partially, Regional Independence and Capital Expenditure have a positive influence on Financial Sustainability. In addition, both are also proven to have a significant simultaneous effect on Financial sustainability.

Keyword: Regional Independence; Capital Expenditure; Financial Sustainability.

1. Pendahuluan

Reformasi di Indonesia yang mengakhiri era Orde Baru pada akhir 1990-an, berdampak besar pada pengelolaan keuangan publik yaitu salah satunya menghasilkan otonomi daerah. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Hak untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya diberikan kepada pemerintah daerah, dan dilaksanakan menurut prinsip otonomi daerah serta tugas pembantuan. Meski demikian, Kewenangan ini dijalankan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan, dengan tetap berpijak pada sistem NKRI sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah lokal diharapkan memiliki pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap kebutuhan masyarakat setempat, sehingga dapat mengambil keputusan secara cepat dan efektif demi menunjang pelayanan publik tanpa harus menunggu persetujuan otoritas pusat. Di sisi lain, penerapan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk menanggung secara penuh pembiayaan wilayahnya. Karena itu, mereka diberi kewenangan untuk mencari dan mengelola sumber pendanaan dari potensi yang dimiliki daerahnya secara mandiri.

Pemerintah daerah berkewajiban untuk berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian hal tersebut dapat menjamin kesejahteraan masyarakat, termasuk memenuhi berbagai kebutuhan, meningkatkan standar hidup, dan memperluas pilihan ekonomi dan sosial bagi masyarakat (Hartaty *et al.*, 2021). Pemerintah daerah senantiasa berupaya memperbaiki kondisi keuangannya dengan meningkatkan efisiensi dan produktivitas pemanfaatan sumber daya demi memberikan pelayanan publik yang lebih optimal. Keuangan daerah yang sehat tercermin dari keberlanjutan fiskalnya, yang memungkinkan pemerintah menjalankan fungsi pelayanan tanpa menimbulkan beban tambahan bagi masyarakat di masa depan. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, *financial sustainability* atau keberlanjutan keuangan dipahami sebagai ekosistem yang sepenuhnya ditopang oleh kebijakan, regulasi, norma, standar, serta beragam instrumen keuangan baik berupa produk, transaksi, maupun layanan yang selaras dengan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sasaran utamanya adalah mendukung pembiayaan kegiatan yang berkelanjutan sekaligus mengarahkan transisi menuju pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Dalam penelitian ini, mengacu pada (Wardhani & Payamta, 2020), pengukuran *financial sustainability* dilakukan dengan menghitung pendapatan yang disesuaikan, yakni selisih antara pendapatan operasional dan beban operasional setelah dikoreksi dengan pengurangan pos luar biasa. Diagram di bawah menyajikan gambaran kondisi keberlanjutan keuangan di Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2019–2023.



Gambar 1. *Financial Sustainability* Provinsi Sumatera Selatan

Gambar 1 memperlihatkan bahwa tingkat keberlanjutan keuangan Provinsi Sumatera Selatan mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Ketidakkonsistenan ini mencerminkan adanya perbedaan dalam peningkatan maupun penurunan mutu serta jumlah layanan publik yang diterima oleh masyarakat. Mengacu pada informasi dari situs djpb.kemenkeu.go.id, keberlanjutan keuangan menjadi elemen krusial dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Stabilitas keuangan daerah memungkinkan

RESEARCH ARTICLE

pemerintah daerah untuk memberikan layanan publik yang bermutu, seperti di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini turut memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang efektif. Agar pemerintah mampu mengambil keputusan yang tepat dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap berbagai indikator yang memengaruhi kondisi keuangan. Pengelolaan keuangan daerah yang tidak optimal berpotensi mengganggu keberlanjutan keuangan (*financial sustainability*), yang pada akhirnya dapat mengancam kestabilan keuangan daerah di masa mendatang serta menimbulkan hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. (Lhutfi & Sugiharti, 2022). Kegagalan keuangan pada pemerintah daerah mencerminkan lemahnya manajemen fiskal yang ditunjukkan oleh ketidakmampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan guna menutup pengeluaran (Khairunisa *et al.*, 2024). Ketidakefektifan ini berdampak pada ketidakstabilan fiskal dan penurunan kualitas layanan publik. Menurut (Lhutfi & Sugiharti, 2022), pemerintah daerah yang mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dan tidak terlalu bergantung pada utang atau dana transfer, memiliki kemampuan lebih besar dalam menjaga keberlanjutan keuangannya. Sumber pendanaan utama untuk belanja daerah, terutama belanja modal, berasal dari pengelolaan keuangan yang efisien (Raudha *et al.*, 2024). Belanja modal ini merupakan bentuk investasi strategis pemerintah daerah yang hasilnya dapat dirasakan masyarakat secara langsung maupun melalui dampak tidak langsung (Burhan *et al.*, 2022).

Walaupun topik keberlanjutan keuangan daerah telah menjadi subjek berbagai studi sebelumnya, analisis yang lebih mendalam tetap diperlukan untuk menelusuri pengaruh sejumlah indikator pada pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Urgensi penelitian ini didasari oleh peran vital pemerintah daerah sebagai penyedia layanan publik yang menjamin aspek kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, dan kualitas hidup masyarakat (Abdullah & Meutia, 2023). Studi ini menggunakan objek penelitian berupa pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan, dengan kemandirian daerah dan belanja modal sebagai variabel bebas yang dianalisis dalam kurun waktu 2019–2023. Terdapat pula sejumlah perbedaan antara penelitian ini dan beberapa kajian sebelumnya, seperti yang dikemukakan dalam penelitian oleh (Abdullah & Meutia, 2023) dan (Lhutfi & Sugiharti, 2022), yang cenderung tidak menitikberatkan pada variabel-variabel independen di bidang keuangan atau akuntansi, melainkan lebih menyoroti aspek sosial-demografi dan integrasi wilayah. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji variabel-variabel yang berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan pemerintah daerah guna menilai sejauh mana pengelolaan tersebut berpengaruh terhadap kapasitas pemerintah dalam menyediakan layanan publik. Penelitian dari (Khairunisa *et al.*, 2024) dan (Sebastian *et al.*, 2023) mengenai *financial sustainability* di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam pengaruh variabel-variabel yang diteliti. Hal ini memperkuat urgensi untuk melanjutkan pengembangan model dalam studi ini.

2. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini mendasarkan kerangka konseptualnya pada goal-setting theory, yakni model motivasi yang pertama kali diperkenalkan oleh Edwin Locke pada tahun 1968 dan menekankan pentingnya penetapan tujuan yang jelas dalam meningkatkan kinerja. Kerangka teori ini menguraikan adanya korelasi positif antara kejelasan tujuan yang ditetapkan dengan efektivitas kinerja dalam penyelesaian tugas (Aulia, 2020). (Locke & Latham, 2006) menjelaskan bahwa tujuan yang jelas dan menantang cenderung mampu meningkatkan kinerja dibandingkan dengan tujuan yang terlalu umum atau mudah dicapai. Berdasarkan pendekatan Goal Setting Theory, perumusan tujuan yang realistis dalam perencanaan strategis akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan *financial sustainability*, sehingga memungkinkan terciptanya layanan publik yang berkelanjutan di masa depan (Abdullah & Meutia, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan *financial sustainability* sebagai tujuan akhir yang ingin diraih, sedangkan tingkat kemandirian keuangan dan belanja modal dianggap sebagai variabel penentu. Semakin besar kekuatan dari faktor-faktor tersebut, maka semakin tinggi pula potensi keberhasilan pencapaian tujuan tersebut. Menurut (Mahmudi, 2019), indikator

RESEARCH ARTICLE

kemandirian daerah dihitung dengan membandingkan besaran PAD terhadap keseluruhan penerimaan daerah yang bersumber dari dana transfer serta pinjaman. Tingkat kemandirian yang tinggi menjadi cerminan rendahnya ketergantungan pada pemerintah pusat serta memperlihatkan kemampuan daerah dalam mengelola kewenangan otonom (Wardhani & Payamta, 2020). Ketika suatu daerah dapat menyediakan layanan publik dengan mengandalkan PAD, maka keberlanjutan keuangan daerah tersebut dinilai lebih stabil dan terjaga (Khairunisa *et al.*, 2024). Kemandirian daerah juga diyakini memiliki dampak positif terhadap *financial sustainability*, karena pemerintah daerah yang mengelola penerimaannya secara mandiri tidak perlu mengandalkan pembiayaan eksternal atau menanggung beban utang (Lhutfi & Sugiharti, 2022). Namun demikian, (Abdullah & Meutia, 2023) dan (Bulan *et al.*, 2023) dalam hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kemandirian daerah tidak secara konsisten menunjukkan dampak signifikan terhadap keberlanjutan keuangan. Oleh karena itu, hipotesis penelitian ini disusun berdasarkan uraian tersebut. H₁: Kemandirian Daerah berpengaruh terhadap *Financial Sustainability*.

Belanja modal mencerminkan seluruh pengeluaran daerah yang digunakan untuk kegiatan investasi, dan komponen ini diketahui memiliki pengaruh positif terhadap *financial sustainability* (Santis *et al.*, 2021). Jika porsi belanja modal mengalami tren penurunan setiap tahunnya, maka kondisi tersebut berisiko menurunkan mutu serta cakupan layanan publik yang dinikmati oleh masyarakat (Raudha *et al.*, 2024). Belanja modal dalam studi ini diukur melalui rasio belanja modal terhadap belanja daerah (Mahmudi, 2019). Meski demikian, (Alfajri *et al.*, 2024) menyatakan belanja modal ternyata memberikan dampak negatif terhadap keberlanjutan keuangan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan belanja modal tidak selalu sejalan dengan tercapainya kondisi keuangan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, hipotesis penelitian ini disusun berdasarkan uraian tersebut. H₂: Belanja Modal berpengaruh terhadap *Financial Sustainability*. Faktor kemandirian daerah dan belanja modal memegang peranan strategis dalam upaya mempertahankan keberlanjutan keuangan suatu daerah. Otoritas daerah yang mampu mengoptimalkan PAD menunjukkan kemandirian fiskal yang lebih kuat, yang menjadi landasan penting bagi stabilitas keuangan dalam jangka panjang. Di sisi lain, peningkatan kualitas layanan publik sering kali dikaitkan dengan indikator belanja modal. Belanja ini berperan sebagai bentuk investasi dalam penyediaan infrastruktur, sarana, dan peralatan yang dibutuhkan guna meningkatkan mutu serta cakupan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, hipotesis penelitian ini disusun berdasarkan uraian tersebut. H₃: Kemandirian Daerah dan Belanja Modal berpengaruh terhadap *Financial Sustainability*.

3. Metode Penelitian

Studi ini melibatkan 17 pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan secara keseluruhan, dengan penerapan teknik sampling sampel jenuh yang mengikutsertakan seluruh populasi sebagai sampel (Sugiyono, 2023). Data sekunder diperoleh dari situs resmi BPK RI, berupa LKPD, khususnya Laporan Realisasi Anggaran yang telah diaudit untuk periode 2019–2023. Total dokumen yang dianalisis adalah 85 laporan, mencakup 17 daerah selama lima tahun. Variabel dalam penelitian ini meliputi kemandirian daerah dan belanja modal sebagai variabel bebas, serta *financial sustainability* sebagai variabel terikat. Tabel 1 memuat detail operasionalisasi variabel.

Tabel 1. Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Skala
<i>Financial Sustainability</i> (Y)	Pendapatan Operasional – Beban Operasional – Pos Luar Biasa	Rasio
Kemandirian Keuangan Daerah (X ₁)	$\frac{\text{Total PAD}}{\text{Pendapatan Transer} + \text{Pinjaman}}$	Rasio
Belanja Modal (X ₂)	$\frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$	Rasio

RESEARCH ARTICLE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel, diawali dengan menentukan model panel terbaik. Setelah itu, dilakukan pengujian terhadap asumsi klasik, diikuti dengan analisis regresi dan pengujian hipotesis. Semua tahapan analisis dilakukan dengan menggunakan bantuan perangkat lunak E-Views versi 12. Berikut merupakan model regresi data panel yang digunakan dalam studi ini.

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Y_{it} = Financial Sustainability
 α = Konstanta
 β = Slope atau Koefisien regresi
 X_1 = Kemandirian Daerah
 X_2 = Belanja Modal
 e = error

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil

4.1.1 Pemilihan Model Data Panel

Dalam analisis regresi data panel, tahap pertama adalah pemilihan model terbaik. Tiga pendekatan estimasi yaitu CEM, FEM, dan REM, dinilai dengan menggunakan uji Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier untuk memastikan model yang paling tepat (Basuki, 2021).

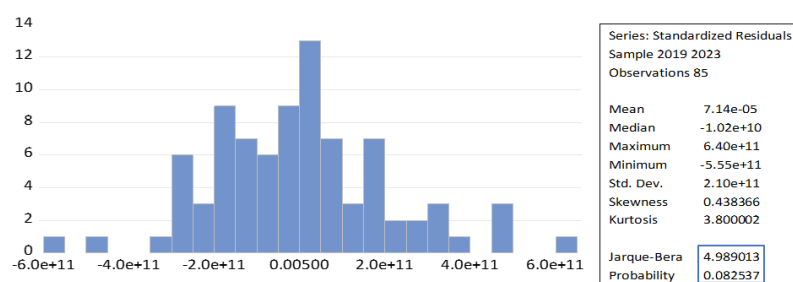
Tabel 2. Pemilihan Model Data Panel

Uji Model Data Panel	Nilai Probabilitas >/< Nilai Signifikansi	Hasil Uji Model
Uji Chow	0,0011 < 0,05	Fixed Effect Model
Uji Hausman	0,1263 > 0,05	Random Effect Model
Uji LM	0,0040 < 0,05	Random Effect Model

Analisis menunjukkan bahwa model *Random Effect* merupakan pilihan terbaik untuk mengkaji hubungan antara Kemandirian Daerah dan Belanja Modal dengan *Financial Sustainability* di pemerintah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan.

4.1.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi data panel yang dipakai memenuhi prinsip dan asumsi dasar yang berlaku. Oleh sebab itu, sebelum regresi dijalankan, data penelitian terlebih dahulu diuji melalui tahapan uji asumsi klasik (Ghozali, 2021). Uji ini mencakup empat jenis, yaitu normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas

RESEARCH ARTICLE

Nilai Jarque-Bera pada uji normalitas tercatat sebesar 4,989013 dengan probabilitas 0,082537, sehingga dengan probabilitas yang melebihi 0,05, data dianggap memiliki distribusi normal.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	9.10E+21	17.41255	NA
X1	4.04E+22	2.038879	1.002410
X2	1.20E+23	15.99199	1.002410

Seluruh variabel independen memiliki nilai VIF di bawah angka 10, yang menandakan tidak adanya indikasi multikolinearitas dalam model regresi.

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

F-statistic	0.989279	Prob. F(2,82)	0.3762
Obs*R-squared	2.002624	Prob. Chi-Square(2)	0.3674
Scaled explained SS	2.837144	Prob. Chi-Square(2)	0.2421

Karena nilai probabilitas Chi-Square dari uji heteroskedastisitas sebesar 0,3674 lebih tinggi dibandingkan 0,05, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

R-squared	0.395430	Mean dependent var	1.93E+11
Adjusted R-squared	0.380685	S.D. dependent var	2.68E+11
S.E. of regression	2.11E+11	Akaike info criterion	55.02110
Sum squared resid	3.64E+24	Schwarz criterion	55.10731
Log likelihood	-2335.397	Hannan-Quinn criter.	55.05578
F-statistic	26.81683	Durbin-Watson stat	1.612896
Prob(F-statistic)	0.000000		

Nilai Durbin-Watson sebesar 1,612896 yang diperoleh dari uji autokorelasi berada dalam batas toleransi - 2 hingga 2, Oleh karena itu, tidak ditemukan indikasi adanya autokorelasi dalam model.

4.1.3 Analisis Regresi Data Panel

Pemilihan model mengindikasikan bahwa Random Effect Model adalah metode paling tepat dalam analisis regresi data panel yang melibatkan beberapa variabel bebas dan satu variabel terikat. Hasil lengkap analisis dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.51E+11	1.09E+11	-3.223482	0.0018
X1	1.30E+12	2.84E+11	4.582137	0.0000
X2	1.54E+12	3.81E+11	4.047243	0.0001
Effects Specification				
Cross-section random			1.10E+11	0.2731
Idiosyncratic random			1.80E+11	0.7269
Root MSE	1.79E+11	R-squared		0.300436
Mean dependent var	1.14E+11	Adjusted R-squared		0.283374
S.D. dependent var	2.15E+11	S.E. of regression		1.82E+11
Sum squared resid	2.72E+24	F-statistic		17.60795
Durbin-Watson stat	1.944062	Prob(F-statistic)		0.000000

RESEARCH ARTICLE

Dari estimasi yang terdapat pada Tabel 6, persamaan regresi data panel yang digunakan dapat dirumuskan dengan cara berikut.

$$Y = -3,51 + 1,30X_1 + 1,54X_2 + e$$

4.1.4 Uji Hipotesis

1) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Mengacu pada Tabel 5, nilai R^2 adalah 0,300436, mengindikasikan bahwa 30,04% perubahan pada *financial sustainability* dapat dijelaskan oleh kemandirian daerah dan belanja modal, sedangkan 69,96% lainnya berasal dari variabel yang tidak tercakup dalam model.

2) Uji Parsial (Uji t)

Dari uji t yang disajikan dalam Tabel 5, diperoleh hasil yaitu:

- Kemandirian daerah terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap *financial sustainability*, terlihat dari nilai t hitung 4,582137 yang melebihi t tabel 1,663649, serta nilai signifikansi 0,0000 yang lebih kecil dari 0,05.
- Selanjutnya, belanja modal juga memiliki dampak positif dan signifikan terhadap *financial sustainability*, dengan nilai t hitung 4,047243 yang lebih tinggi dibanding t tabel, dan nilai signifikansi 0,0000 di bawah 0,05.

3) Uji Simultan (Uji f)

Data pada Tabel 5 memperlihatkan bahwa nilai F-hitung sebesar 17,60795 melebihi nilai F-tabel sebesar 2,71734. Oleh karena itu, hipotesis ketiga diterima, yang berarti kemandirian daerah dan belanja modal berpengaruh secara simultan terhadap *financial sustainability*. Selain itu, probabilitas F yang sebesar 0,000000 dan berada di bawah 0,05 semakin menegaskan bahwa pengaruh tersebut signifikan secara bersamaan.

4.2 Pembahasan

Pada uji parsial hipotesis pertama, variabel kemandirian daerah memperoleh t-hitung sebesar 4,582137, melebihi t-tabel yang sebesar 1,663649, serta nilai signifikansi 0,0000 yang kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian daerah memiliki dampak positif dan signifikan terhadap *financial sustainability* pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Peningkatan kemandirian daerah yang ditandai dengan kemampuan membiayai belanja tanpa ketergantungan pada pemerintah pusat mendorong tercapainya keberlanjutan keuangan. Temuan ini diperkuat oleh studi sebelumnya seperti (Khairunisa *et al.*, 2024), (Alfajri *et al.*, 2024), (Sebastian *et al.*, 2023), (Lhutfi & Sugiharti, 2022), serta (Wardhani & Payamta, 2020), yang menyimpulkan bahwa pengelolaan sumber daya daerah secara berkelanjutan mendorong terciptanya pelayanan publik yang berkualitas tanpa meninggalkan beban keuangan bagi generasi mendatang. Namun demikian, hasil ini bertentangan dengan temuan (Abdullah & Meutia, 2023) serta (Bulan *et al.*, 2023), kemandirian daerah tidak memberikan dampak terhadap *financial sustainability*. Ketidaksesuaian ini dapat terjadi karena tingginya tingkat kemandirian keuangan tidak selalu diikuti oleh penggunaan PAD untuk belanja modal yang menunjang pelayanan publik. Uji parsial hipotesis kedua menunjukkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *financial sustainability* pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini didukung oleh nilai t-hitung sebesar 4,047243 yang lebih besar dari t-tabel 1,663649, serta nilai signifikansi 0,0005 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti, daerah yang mampu mengalokasikan belanja modal secara optimal untuk mendukung layanan publik memiliki peluang lebih besar dalam mencapai *financial sustainability*. Kontribusi ini juga berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan terciptanya pembangunan berkelanjutan. Penemuan ini selaras dengan pendapat (Raudha *et al.*, 2024), belanja modal merupakan salah satu sumber pendanaan utama dalam pengadaan fasilitas dan infrastruktur pelayanan publik. (Santis *et al.*, 2021) juga menggarisbawahi pentingnya belanja modal dalam membangun keberlanjutan fiskal daerah. Namun, perbedaan hasil ditemukan dalam penelitian (Alfajri *et al.*, 2024), yang justru berpendapat belanja modal mempunyai dampak negatif terhadap *financial sustainability*. Ketidakseimbangan pengalokasian anggaran pada belanja modal dapat menjadi penyebab

RESEARCH ARTICLE

utama dari pengaruh negatif tersebut, yang menunjukkan bahwa efek dari belanja modal dapat berbeda tergantung pada strategi dan kapasitas daerah dalam mengelolanya. Hasil pengujian simultan pada hipotesis ketiga menunjukkan bahwa nilai F-hitung sebesar 17,60795 lebih besar dibandingkan F-tabel yang sebesar 2,715937, dengan nilai signifikansi 0,000000 yang kurang dari 0,05. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemandirian daerah dan belanja modal secara bersamaan memiliki pengaruh signifikan terhadap *financial sustainability* pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun anggaran 2019–2023. Temuan ini selaras dengan tujuan penelitian dalam mengidentifikasi peran kedua faktor tersebut. Kemandirian daerah mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam menjalankan fungsinya secara otonom tanpa banyak bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Di sisi lain, belanja modal merepresentasikan investasi pemerintah daerah dalam bentuk aset tetap atau pembangunan infrastruktur. Kedua aspek ini secara bersama-sama menjadi indikator utama dalam mengukur tingkat keberlanjutan keuangan pemerintah daerah.

5. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian, kemandirian daerah dan belanja modal terbukti memberikan kontribusi positif signifikan terhadap *financial sustainability* pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2019–2023, baik ketika dianalisis secara parsial maupun simultan. Hasil ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah memegang peran penting dalam menjaga keberlanjutan keuangan. Oleh karenanya, temuan ini diharapkan menjadi rujukan strategis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang berfokus pada keberlanjutan jangka panjang. Namun, mengingat nilai R-squared yang diperoleh belum optimal, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk mengeksplorasi variabel tambahan yang relevan dari laporan keuangan daerah, serta memperluas cakupan wilayah dan periode penelitian, agar diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh. Pemerintah daerah juga didorong untuk mengoptimalkan potensi PAD guna memperkuat kapasitas fiskalnya. Dengan meningkatnya *financial sustainability*, pemerintah dapat menyediakan layanan publik secara berkelanjutan tanpa memperbesar beban utang di masa depan. Selain itu, belanja modal dapat terus diperkuat melalui pemanfaatan dana transfer pusat, hibah, maupun SiLPA.

6. Referensi

- Abdullah, S., & Meutia, R. (2023). What determines financial sustainability in local government? Evidence from Aceh Province, Indonesia. *Reaksi*, 8(3).
- Alfajri, N. A., Ariani, N. E., & Nuraini, A. (2024). Financial sustainability in the spotlight: Unraveling the impact of financial independence, debt ratio, and capital expenditure. *International Conference on Decision Aid Sciences and Applications (DASA)*, Manama, Bahrain. 2024, 1–6. <https://doi.org/10.1109/DASA63652.2024.10836474>
- Aulia. (2020). Goal setting theory vs reinforcement theory: In RUH perspective theory. *Seminar Nasional Magister Psikologi Universitas Ahmad Dahlan*, 62–75.
- Basuki, A. T. (2021). *Analisis regresi data panel dalam penelitian ekonomi & bisnis: Dilengkapi penggunaan Eviews* (Edisi 1). Yogyakarta.
- Bulan, T. T., Diswandi, & Nyoman, N. A. P. I. (2023). Determinants of budget transparency toward financial sustainability. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 139(7), 98–113. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2023-07.11>.

RESEARCH ARTICLE

- Burhan, M., Kartini, & Said, D. (2022). Pengaruh kemandirian daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi. *E-Journals (Al Buhuts)*, 18(2), 296–310.
- Hartaty, S., Jumarni, E. F., Oktarida, O., & Vera, R. L. (2021). Determinants of economic growth in South Sumatra in 2010–2018. *Proceedings of the 4th Forum in Research, Science, and Technology (FIRST-T3-20)*, 1, 2010–2013. <https://doi.org/10.2991/ahsseh.k.210122.020>.
- Khairunisa, D., Saftiana, Y., & Sari, R. (2024). The effect of regional independence and dependence on financial sustainability in government in South Sumatra Province (Vol. 03).
- Lhutfi, I., & Sugiharti, H. (2022). Financial sustainability of local governments in Indonesia. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 14(1), 159–170.
- Locke, E. A., & Latham, G. P. (2006). Improved zero point method (IZPM) for the transportation problems. *Applied Mathematical Sciences*, 6(109–112), 5421–5426.
- Mahmudi. (2019). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah* (Edisi 4). UPP: STIM YKPN.
- Raudha, N., Meutia, R., & A, N. (2024). The influence of financial autonomy, capital expenditure, and unemployment rate on financial sustainability in provincial governments in Indonesia. *Jurnal Kinabalu*, 30, 143–159. <https://doi.org/10.51200/ejk.v30i.5846>.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*.
- Santis, S., Incollingo, A., & Citro, F. (2021). How to manage the components of financial sustainability in local governments. *Journal of Management and Sustainability*, 11(2), 111. <https://doi.org/10.5539/jms.v11n2p111>.
- Sebastian, M. R., Oktarida, A., & Aprianti, S. (2023). Financial sustainability in South Sumatra Province. *Business and Sustainability*, 1(1), 123–132.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D* (Edisi 2). Bandung: Alfabeta.
- Wardhani, D. T., & Payamta. (2020). Menguji faktor determinan financial sustainability pada sektor pemerintah. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(1). <https://doi.org/10.33603/jka.v4i1.3305>.